

Kemajuan Deklarasi Hutan New York

Melindungi dan Merestorasi Hutan

Kisah Komitmen Besar namun Progres Terhad

LAPORAN ASESMEN LIMA TAHUN ▪ SEPTEMBER 2019

Lima tahun setelah Deklarasi Hutan New York

Pada September 2014, koalisi luas berbagai organisasi pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil dan masyarakat adat mengesahkan Deklarasi Hutan New York (DHNY). Didorong oleh pemahaman bersama bahwa menghentikan penggundulan hutan (deforestasi) adalah amat penting untuk menjadikan kenaikan suhu tetap berada di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat praindustri, para pendukung tersebut – yang kini berjumlah lebih dari 200 – mengadopsi deklarasi ambisius yang memerinci sepuluh tujuan. Dengan berkomitmen pada kesepuluh tujuan deklarasi tersebut, para pendukung telah sepakat untuk berusaha menjadikan penggundulan hutan berkurang separuhnya paling lambat 2020 dan mengakhiri penggundulan hutan paling lambat 2030. DHNY juga menyerukan restorasi 150 juta hektare tanah hutan dan bentang alam yang terdegradasi paling lambat 2020 dan 350 juta hektare paling lambat 2030.

Lima tahun kemudian, hanya terdapat sedikit bukti bahwa berbagai tujuan ini berada dalam jalur yang seharusnya, dan mencapai target DHNY 2020 hampir tidak mungkin. Penggundulan hutan tropis telah berlanjut pada kelajuan yang tidak dapat dipertahankan (unsustainable) sejak 2014. Lebih lanjut, meskipun kehendak politik untuk merestorasi lahan terdegradasi telah meningkat, berbagai usaha untuk melaksanakan janji restorasi berjalan terlalu lambat untuk mencapai kemajuan berarti. Setakat ini, sebagian besar restorasi telah berlangsung di luar hutan alam. Lahan-lahan hutan terus dikonversi untuk penggunaan tanah komersial lain, mengindikasikan bahwa keuntungan jangka pendek konversi hutan tetap dipentingkan lebih daripada keuntungan jangka panjang konservasi hutan dan restorasi di banyak keputusan penggunaan lahan.

Terlepas dari apa yang mungkin disiratkan oleh berbagai tren ini, banyak aktor swasta dan pemerintah telah mengambil tindakan untuk menangani penggundulan hutan – tetapi tindakan-tindakan ini sering kurang sungguh-sungguh dan tetap terisolasi. Sebagai contoh, berbagai perusahaan menilai kontribusi mereka terhadap penggundulan hutan dan berbagai pemerintah mengawasi berbagai proyek dan program restorasi dan konservasi. Namun, secara keseluruhan berbagai tindakan untuk menangani penyebab langsung dan tidak langsung penggundulan hutan dan memberi intensif dan dana bagi restorasi tidak memadai untuk mengkatalisasi pergeseran sistemik dalam perilaku. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut sering tidak terhubung dengan situasi sosial ekonomi yang lebih luas dan tidak dirancang untuk menghadapi berbagai penyebab penggundulan hutan yang saling berkaitan.

Hutan tropis harus dilindungi secara efektif untuk memenuhi target iklim

Rata-rata wilayah tutupan pohon seluas Kerajaan Inggris hilang setiap tahun antara 2014 dan 2018. Sementara titik utama (hotspot) hilangnya tutupan pohon (tree cover) telah muncul di Afrika dalam lima tahun terakhir, Amerika Latin tetap kehilangan sebagian besar tutupan pohon setiap tahun. Pada Juni 2019 saja, kelajuan penggundulan hutan di Amazon Brasil meningkat sampai 88 persen berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Ekspansi komoditas agrikultur terus menjadi penyebab terbesar penggundulan hutan. Lebih dari 90 persen penggundulan hutan global terkait dengan komoditas agrikultur dan urbanisasi yang terjadi di wilayah tropis.

Makin banyaknya kehilangan hutan primer yang tidak tergantikan secara khusus mengkhawatirkan karena hutan-hutan ini berfungsi sebagai penyerap karbon yang tak ternilai. Kehilangan hutan hujan primer tropis meningkat sampai 44 persen terkait dengan periode dasar 2002–13, dari 3,0 menjadi 4,3 juta hektare per tahun – wilayah yang luasnya dua kali El Salvador. Rata-rata hilangnya tutupan pohon tropis setiap tahun antara 2014 dan 2018 mengemisi 4,7 gigaton karbon dioksida setiap tahun - melebihi semua emisi gas rumah kaca di Uni Eropa (UE) pada 2017. Hampir separuh dari hal ini terjadi dalam hutan primer tropis.

Secara lebih positif, laju hilangnya hutan primer di Indonesia melambat secara signifikan pada 2017 dan 2018, lebih dari 30 persen dibandingkan laju kehilangan rata-rata selama periode rujukan 2002–2016. Pertemuan berbagai faktor, termasuk berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, serta kondisi cuaca lebih basah yang mengurangi insiden dan tingkat kebakaran (wildfire), menyebabkan pengurangan tajam kehilangan hutan dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, sekali lagi negara Indonesia sedang mengalami insiden kebakaran hutan yang teruk sejak 2015, menegaskan keperluan untuk meningkatkan langkah-langkah dan usaha untuk mengurangi kehilangan hutan primer.

Restorasi ekosistem hutan harus dipercepat

Restorasi hutan dan bentang alam harus melengkapi usaha untuk menghentikan penggundulan hutan dengan memulihkan sebagian dari fungsi dan jasa ekosistem dari hutan yg telah dibuka. Di antara banyak keuntungan, menambahkan pohon pada lanskap hutan yang telah terdegradasi dapat memperbaiki penyediaan dan kualitas air dan udara dan mengurangi resiko erosi tanah dan banjir. Pada skala yang lebih besar, hutan yang direstorasi dapat meningkatkan biodiversitas dan menyerap karbon dalam jumlah substansial dari atmosfer, meskipun mengganti persediaan karbon yang diserap dalam hutan alam yang matang membutuhkan waktu yang lama. Bertambahnya tutupan pohon di lanskap non-hutan yang terdegradasi seperti lahan (cropland) dan padang penggembalaan (pasture) lewat sistem wanatani (agroforestri) juga dapat menghasilkan jasa ekosistem yang menguntungkan komunitas lokal. Berbagai pendekatan lain untuk meningkatkan tutupan vegetasi – seperti penghutanan (aforestasi) dan produksi bahan baku (feedstock) dalam skala besar untuk bioenergi – membutuhkan penilaian cermat terhadap berbagai untung-rugi dan keterbatasan. Hal ini terutama relevan ketika pendekatan itu mengganti ekosistem alam dengan plantasi monokultur non-asli (non-native).

Kehendak politik untuk merestorasi lanskap yang terdegradasi sudah kuat, tetapi menerjemahkan komitmen restorasi hutan dan bentang alam menjadi tindakan nyata tetap merupakan tantangan. Setakat ini, hanya sebagian dari berbagai tujuan restorasi yang menjadi komitmen telah diwujudkan seperti peningkatan wilayah tutupan pohon atau hutan. Sampai April 2019, terdapat 59 ikrar Tantangan Bonn dari berbagai negara, yurisdiksi, dan perusahaan yang berjumlah total 170,6 juta hektare komitmen restorasi untuk 2020 dan 2030 dikombinasikan. Namun, bukti pelaksanaan di dalam hutan adalah hanya 18 persen dari tujuan restorasi 2020 (26,7 juta hektare direstorasi sejak 2000).

Berbagai kendala dalam sumber daya dan data yang tersedia untuk memantau restorasi menjadikan sulit untuk mengkuantifikasi kemajuan restorasi hutan. Sebuah studi kasus di kawasan Mekong yang menggunakan data satelit merintis pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami berbagai perbedaan penting dalam dinamika restorasi hutan. Hasil studi kasus ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perolehan tutupan pohon di kawasan ini sejak 2010 telah terjadi di luar hutan (misalnya lahan tanaman, semak belukar, dan lahan non-hutan lain) bukan di dalam hutan (memperoleh 4,7 juta hektare di luar hutan sambil kehilangan 0,3 juta hektare bersih di dalam hutan). Pohon di luar hutan memberikan manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan yang penting, tetapi lebih banyak tindakan perlu dilakukan untuk melindungi dan merestorasi berbagai ekosistem hutan alam untuk meningkatkan fungsi penyerapan karbon dan biodiversitas mendasarnya.

Penyebab penggundulan hutan: Tindakan berskala besar dan lebih terkoordinasi dibutuhkan

Berbagai usaha untuk menangani penyebab penggundulan hutan mencapai kemajuan bertahap. Sejumlah pemerintah telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengonservasi hutan dan mengurangi penggundulan hutan dan degradasi hutan. Beberapa pemerintah juga telah merumuskan berbagai kontribusi yang ditetapkan secara nasional untuk Kesepakatan Paris yang mencakup tindakan adaptasi dan mitigasi berbasis lahan, dan telah membuat kemajuan dalam memperkuat tata kelola hutan. Banyak perusahaan swasta telah berkomitmen untuk menghilangkan penggundulan hutan yang menjadi bagian penting dalam rantai pasokan mereka, dan berbagai lembaga keuangan telah mulai menyaring investasi yang berdampak negatif terhadap hutan. Masyarakat sipil telah mengembangkan berbagai perkakas pemantauan dan penelusuran sambil bekerja sama dengan komunitas di darat untuk menerapkan berbagai proyek dan program untuk menghentikan penggundulan hutan dan merestorasi hutan. Namun, berbagai tindakan sekarang ini tidak cukup untuk memenuhi berbagai target DHNY karena penerapannya lambat dan berbagai tindakan tetap terbatas dalam hal cakupan geografis dan tidak benar-benar terintegrasi di sepanjang rantai pasokan dan lintas sektor.

Kenaikan jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi atau menghilangkan penggundulan hutan dari rantai pasokan mereka telah berhenti dalam tiga tahun terakhir. Di antara berbagai perusahaan dengan komitmen yang ada, hanya 8 persen yang memiliki komitmen nol penggundulan hutan yang mencakup semua pengoperasian dan rantai pasokan mereka. Berbagai perusahaan lambat dalam menerapkan komitmen karena tidak adanya kesepakatan tentang tindakan prioritas, pemahaman terbatas tentang di mana terdapat resiko, dan keraguan untuk berinvestasi dalam aktivitas berkelanjutan dengan pengembalian keuangan yang belum jelas. Lebih lanjut, laporan perusahaan tentang tindakan yang sudah diambil dan kemajuan yang sudah dibuat dalam mencapai berbagai komitmen ini tetap tidak memadai dalam menilai keberhasilan berbagai pendekatan nol penggundulan hutan berbasis rantai pasokan ini.

Terdapat bukti bahwa pendekatan sektoral berjaya menurunkan kadar deforestasi. Moratorium Kedelai di Amazon dan Moratorium Lahan Gambut di Indonesia telah berhasil di wilayah targetnya, meskipun terdapat indikasi bahwa Moratorium Kedelai telah menyebabkan semacam pemindahan penggundulan hutan. Meningkatnya momentum di sekitar tindakan kolaboratif pada tingkat sub-nasional di banyak negara produsen menunjukkan arah kemajuan, tetapi penerapan berbagai pendekatan yurisdiktif ini masih berada pada tahap awal dan dampaknya bagi penggundulan hutan akibat agrikultur masih harus dilihat. Namun demikian, usaha dari negara produsen dan konsumen untuk mendorong penerapan komitmen perusahaan masih lemah dan hanya terbatas pada peringkat peraturan pemerintah.

Permintaan global untuk bahan tambang dan minyak dan gas diperkirakan akan tumbuh signifikan dalam beberapa dasawarsa mendatang, sehingga meningkatkan resiko hilangnya hutan karena aktivitas ekstraktif. Sekarang ini wilayah hutan utuh di Amazon, Lembah Kongo, dan Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan laju penggundulan hutan dan fragmentasi karena adanya berbagai proyek pertambangan dan minyak dan gas baru serta infrastruktur yang telah direncanakan. Hal yang lebih memprihatinkan adalah tren di banyak negara yang membalikkan status wilayah terlindung untuk membuka wilayah baru untuk pembangunan. Pada saat yang sama, berbagai gerakan berbasis komunitas yang menentang pengoperasian tambang yang destruktif mendapatkan pengakuan internasional dan mendapat kemenangan hukum, dan makin banyak dukungan tingkat tinggi untuk menggabungkan perlindungan hutan dan biodiversitas dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, kemajuan ini masih harus diterjemahkan menjadi perubahan transformatif nyata dalam pendekatan sektor ekonomi ini terhadap hutan.

Kemiskinan juga dapat mendorong kehilangan hutan. Tidak adanya alternatif di lingkungan sekitar dan bertambahnya tekanan penduduk sering memicu penggunaan hutan secara tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai contoh, agrikultur berpindah mengubah bentuk lebih dari seperempat lahan berhutan di Republik Demokrasi Kongo dan menyebabkan 70 persen dari total hilangnya tutupan pohon di negara itu. Meskipun sistem agrikultur berotasi memungkinkan hutan sekunder untuk tumbuh kembali dan tanah subur kembali, bertambahnya populasi menyebabkan sistem agrikultur berpindah makin banyak mengalami tekanan. Petani menghadapi tekanan untuk memperpendek siklus panen berpindah, sehingga menyebabkan merosotnya produktivitas dan akhirnya meluasnya lahan tanaman lewat pembukaan hutan primer. Demikian juga, karena tidak ada pilihan lain, penebangan pohon untuk menghasilkan arang dan tanaman tunai (cash crop) tetap merupakan satu dari sedikit kesempatan bagi orang miskin di daerah terpencil untuk mendapatkan uang tunai, diperburuk oleh permintaan yang berasal dari berkembangnya kota. Data satelit Lembah Kongo memperlihatkan bahwa laju gangguan di hutan primer dan lahan kayu (woodland) naik dua kali lipat antara 2001 dan 2014, berkorelasi dengan kenaikan penduduk (termasuk dari migrasi) sepanjang periode waktu tersebut.

Sebagian besar program yang menangani kemiskinan dan pembangunan manusia tidak menelusuri dampak terhadap hutan, sehingga sulit menentukan seberapa besar dukungan yang secara khusus menangani hilangnya hutan. Namun, pemahaman yang bertambah tentang kaitan antara kemiskinan dan degradasi sumber daya dapat membantu menilai kemampuan intervensi seperti pengesahan aktivitas komersial skala kecil dan pengadopsian tungku masak/kompor bersih.

Memperbaiki konteks dan kondisi untuk penerapan amat penting untuk mencapai tujuan kehutanan

Mencapai tujuan kehutanan nasional dan internasional adalah tidak mungkin tanpa pembiayaan khusus dan tepercaya dari sumber dalam negeri, internasional, pemerintah, dan swasta untuk menangani masing-masing penyebab hilangnya hutan di atas. Hal ini menyiratkan perlunya aliran pembiayaan yang baru, tetapi yang lebih penting adalah pengarah ulang pembiayaan arus utama untuk aktivitas yang memiliki hasil konservasi positif (pembiayaan "hijau"). Dewasa ini, pembiayaan hijau membentuk bagian sangat kecil dari pembiayaan kelabu yang beralir kepada negara-negara dengan tingkat penggundulan hutan yang tinggi; keuangan pembangunan bagi pertanian adalah 15 persen lebih daripada keuangan untuk mitigasi perubahan iklim dengan tujuan perlindungan hutan. Berbagai perusahaan dan pemerintah terus memberikan subsidi dan dukungan bagi aktivitas yang berpotensi membahayakan hutan. Bahkan meskipun terdapat kepentingan, lembaga keuangan dan pemberi pinjaman pada umumnya kekurangan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan agar investasi dan pembiayaan tidak mendukung penggundulan hutan.

Selain pergeseran dalam pembiayaan, lebih banyak pembiayaan baru dibutuhkan.

Pembiayaan hijau untuk hutan saat ini adalah tidak lebih daripada USD 22 milyar. Sejak penilaian mendalam kita tentang tujuan pembiayaan DHNY pada 2017, keseluruhan pembiayaan untuk hutan telah bertambah dalam jumlah yang tidak signifikan. Investasi untuk menghentikan penggundulan hutan di negara-negara tropis mewakili kurang daripada 1.5 persen – hanya USD 3.2 milyar – dari USD 256 milyar yang telah dijanjikan oleh institusi multilateral dan negara donor sejak 2010 untuk mitigasi perubahan iklim. Sektor terbarukan saja telah menerima lebih dari 100 kali lebih banyak dari komitmen pembiayaan hutan.

Tindakan dari sisi permintaan berperan penting dalam menangani penyebab penggundulan hutan. Berbagai ikrar internasional seperti Deklarasi Amsterdam telah dibuat untuk menghilangkan penggundulan hutan dari rantai pasokan komoditas. Namun, hanya sektor kayu yang telah melakukan tindakan konkret dan berbagai tindakan regulatif telah diadopsi (misalnya Regulasi Kayu Uni Eropa dan Undang-Undang Lacey di Amerika Serikat). Komunikasi Masyarakat Eropa baru-baru ini tentang “Meningkatkan Tindakan Uni Eropa menentang Penggundulan Hutan dan Degradasi Hutan” mengisyaratkan bahwa Uni Eropa mempertimbangkan seperangkat tindakan regulatif dan non-regulatif yang mengurangi impor produk penggundulan hutan terintegrasi (embedded) ke dalam Uni tersebut dan yang memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung restorasi dan konservasi hutan. Uni Eropa juga mempertimbangkan tindakan yang mengarahkan ulang pembiayaan untuk mendukung praktik penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan.

Bersama dengan pembiayaan, tata kelola yang baik memberikan landasan untuk kebijakan yang akan dikembangkan, perundang-undangan yang akan ditegakkan, dan kondisi untuk investasi dan penerapan yang akan ditingkatkan. Peningkatan dalam tata kelola hutan, termasuk pemiringan lahan, transparansi, adopsi kebijakan, dan penguatan penegakan hukum, tetap terlalu lambat dibandingkan dengan ancaman makin cepat yang dihadapi oleh hutan. Berbagai kebijakan dan perkakas yang baru dan lama, seperti kesepakatan sektoral dan skema sertifikasi, dapat digunakan untuk meminimalkan dampak aktivitas komersial terhadap hutan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi penerapannya. Hal ini termasuk tata kelola yang kuat, desain kebijakan yang baik, dan penyesuaian berbagai kepentingan yang berkonflik di antara badan pembuat regulasi. Tren di Brasil memperlihatkan kerapuhan kebijakan kehutanan terkait perubahan prioritas politik. Setelah perubahan pemerintahan pada 2019, penggundulan hutan di Brasil meningkat karena pembalikan kerangka kerja dan kebijakan perlindungan hutan institusional dan hukum yang ada.

Konservasi efektif ekosistem hutan mencakup mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal (MADL) terhadap konservasi hutan. Ketika MADL memiliki hak atas lahan secara penuh untuk mengatur wilayah hutan, hutan dan karbon yang disimpannya dilindungi secara lebih baik dari waktu ke waktu. Terlepas dari hal ini, MADL masih berjuang untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan penuh atas hak terhadap lahan. Sekitar separuh dari lahan dunia terkena klaim adat sejak dulu dari berbagai kelompok MADL yang telah menggunakan, memiliki, dan mendudukinya selama beberapa generasi.

Menatap masa depan: Jalur menuju 2030

Untuk mencapai berbagai tujuan DHNY dan menjadikan pemanasan global tetap di bawah 2 Celsius, amat penting untuk melindungi hutan alam, dan khususnya hutan primer, serta merestorasi hutan alam, dengan fokus khusus pada usaha restorasi dan perlindungan di negara-negara beriklim tropis. Namun, merestorasi hutan tidak dapat menutupi kerugian akibat penggundulan hutan karena hilangnya habitat dan jasa ekosistem dapat membutuhkan waktu beberapa dasawarsa atau abad untuk dipulihkan. Oleh karena itu, adalah amat penting bahwa restorasi digunakan sebagai tindakan tambahan, dan bukan “alternatif” dari menghentikan hilangnya hutan.

Demikian juga, penyebab langsung dan tidak langsung penggundulan hutan yang berasal dari produksi makanan, bahan bakar, dan serat harus dikurangi untuk menghilangkan tekanan yang tidak seharusnya terhadap lahan sambil juga memberi makanan penduduk yang bertambah. Hal ini membutuhkan sistem yang lebih produktif di antara petani kecil dan penduduk berkebutuhan dasar, manajemen lahan yang diperbaiki dan praktik lintas sektor, dan pada tingkat yang lebih besar, perpindahan menuju diet berbasis tanaman yang berkelanjutan di antara orang kaya, dan pengurangan dalam keseluruhan terbuangnya makanan dan hilangnya makanan.

Berbagai kebijakan yang dimotivasi oleh prioritas lain seperti keamanan pangan, kesehatan masyarakat, atau pembangunan wilayah terpencil perlu menggabungkan konservasi ke dalam prioritas program mereka. Kebijakan publik yang menggabungkan beberapa tujuan cenderung lebih kuat daripada yang dimotivasi oleh persoalan tunggal karena mendapatkan dukungan (buy-in) dan dukungan keuangan yang lebih banyak dan lebih luas. Contoh tujuan yang diselaraskan mencakup investasi berkelanjutan dalam produktivitas agrikultur, hak lahan, kesehatan masyarakat, investasi daerah pada infrastruktur dan institusi, akses pasar, biodiversitas, dan jasa ekosistem. Lebih lanjut, agar efektif kebijakan harus diterapkan dan ditegakkan dan kemajuan harus diukur dan dipantau agar dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan.

Ucapan terima kasih

Laporan ini milik domain publik. Pengguna dapat mengunduh, menyimpan, atau mendistribusikan laporan ini secara elektronik atau dalam format lain. Untuk mengunduh laporan lengkap, silakan kunjungi: forestdeclaration.org.

Gunakan kutipan berikut untuk merujuk pada hasil yang disajikan dalam laporan ini:
NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments yet Limited Progress. New York Declaration on Forests Five-Year Assessment Report. Climate Focus (coordinator and editor). Accessible at forestdeclaration.org.

Penulis:

Ingrid Schulte (Coordinating Author), Charlotte Streck, Stephanie Roe

David Gibbs (Goal 1); Stephanie Roe, Katie Reytar, Fred Stolle (Goal 5);
Haseeb Bakhtary (Goal 2); Erin D. Matson (Goals 3 and 4); Ingrid Schulte (Goals 8 and 9);
Darragh Conway, Barbara Hermann (Goal 10)

Untuk daftar lengkap kontributor, pengulas, dan penasihat, silakan lihat laporan lengkap.

Mitra Penilai DHNY:

CDP, Center for International Forestry Research (CIFOR), Chatham House, Clean Cooking Alliance, Climate Focus, Conservation International (CI), Environmental Defense Fund (EDF), Forest Foundation Philippines, Forest Trends, Global Canopy, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), the International Center for Tropical Agriculture (CIAT), International Union for Conservation of Nature (IUCN), National Wildlife Federation (NWF), Overseas Development Institute (ODI), Rainforest Alliance, Rights and Resources Initiative (RRI), Stockholm Environment Institute (SEI), The Nature Conservancy (TNC), The Sustainability Consortium (TSC), Woods Hole Research Center (WHRC), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF-US), and the Zoological Society of London's (ZSL) Sustainability Policy Transparency Toolkit (SPOTT) initiative.

This project is supported by the Climate and Land Use Alliance and Good Energies Foundation. Research that contributed to this project is part of the International Climate Initiative (IKI). The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag via the NYDF Global Platform.

Supported by:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety



New York Declaration on Forests
GLOBAL PLATFORM

based on a decision of the German Bundestag



forestdeclaration.org | [@NYDFAssessment](https://twitter.com/NYDFAssessment)